

Regional Fiscal In Brief

Vol III/ Mei/ 2025

ALCo

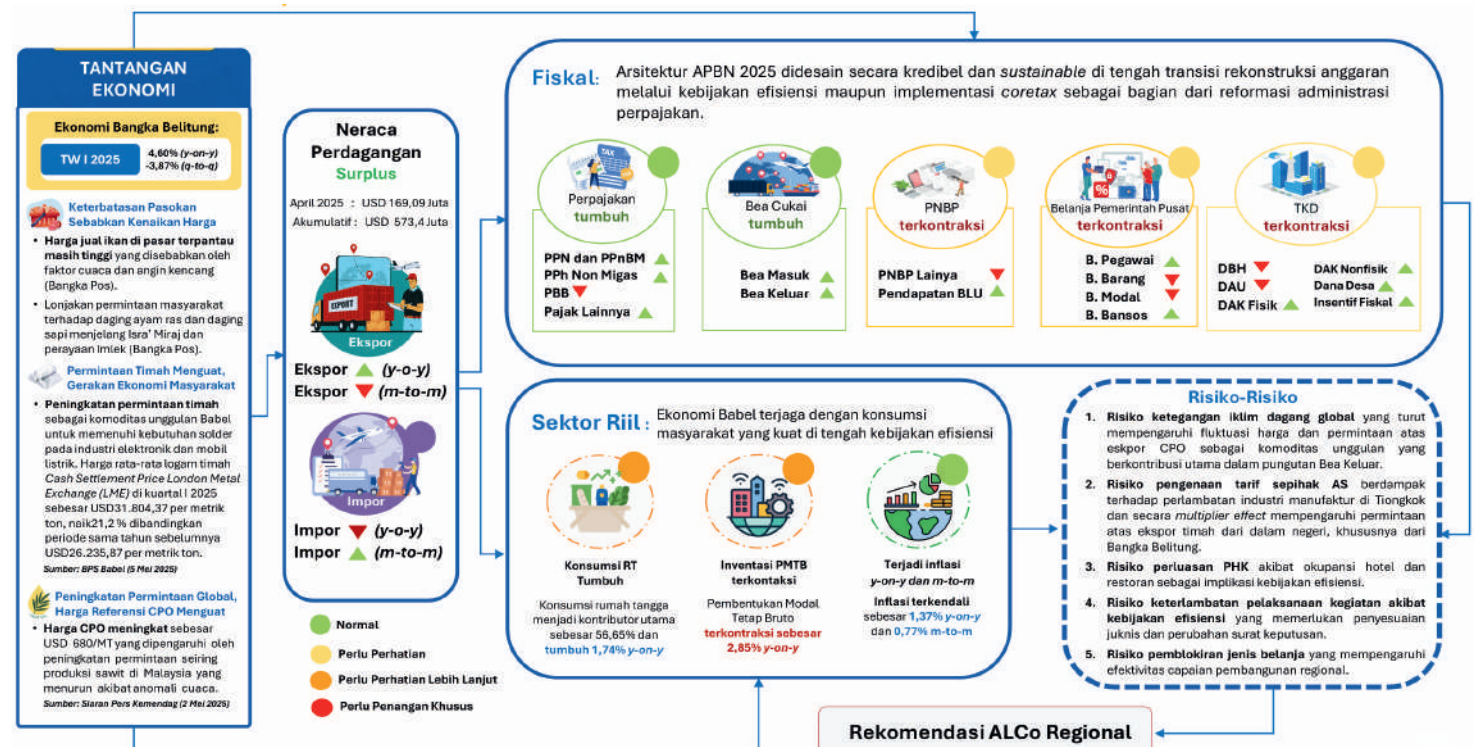
Provinsi Bangka
Belitung

EXECUTIVE SUMMARY

Pada triwulan I-2025, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mampu tumbuh 4,60 persen secara *y-on-y* setelah mengalami perlambatan sepanjang tahun 2024 akibat kasus tata niaga timah. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh tinggi akibat meningkatnya aktivitas industri logam dasar, terutama *smelter* timah, yang mempengaruhi permintaan produksi. Pada triwulan I-2025, ekspor logam timah mulai dilakukan pada bulan Januari 2025. Pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian didorong oleh meningkatnya permintaan bijih logam khususnya timah dan aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya. Selain itu, inflasi Kepulauan Bangka Belitung pada April 2025 masih terjaga pada tingkat 4,60 persen (*y-on-y*) yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat yang terkendali.

Di sisi fiskal, hingga akhir April 2025 penerimaan negara dari penerimaan pajak dan bea cukai tercatat tumbuh 39,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, adanya rekonstruksi anggaran 2025 yang mengarah pada kebijakan efisiensi mendorong realisasi Belanja Pemerintah Pusat melambat, terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Sementara itu, dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan daerah yang inklusif kepada 7 kabupaten/kota di lingkup Bangka Belitung, Belanja APBN masih didominasi Transfer ke Daerah yang mencapai 76,18 persen dari total belanja negara. Di sisi lain, realisasi pendapatan dan belanja APBD konsolidasian mengalami kontraksi dengan penurunan cukup dalam yakni masing-masing sebesar 33,58 persen dan 18,69 persen *y-on-y*.

Strategic Dashboard



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

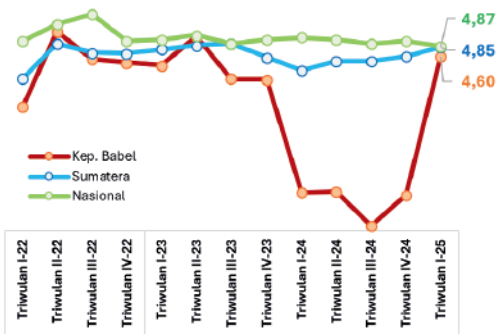
Pertumbuhan Ekonomi



c-to-c
4,60
persen

y-on-y
4,60
persen

q-t-q
-3,87
persen



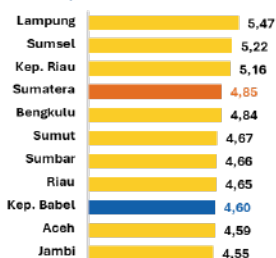
Secara y-on-y lebih rendah dari Sumatera & Nasional

Sumatera ➡ **4,85%**

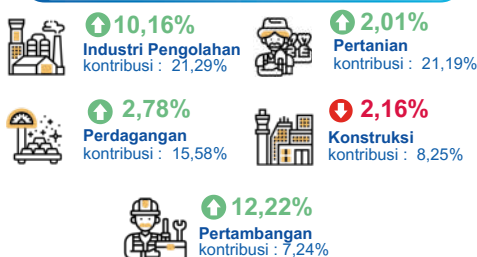
Nasional ➡ **4,87%**

Ekonomi Babel terjaga dengan konsumsi masyarakat yang kuat di tengah transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan efisiensi

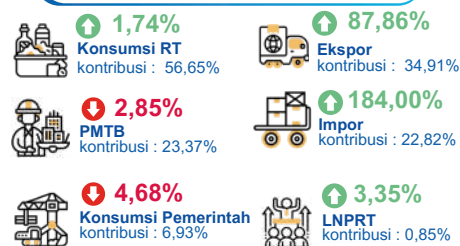
Laju Ekonomi Babel berada dalam peringkat kedepan se-Sumatera



PDRB LAPANGAN USAHA - TW I 2025



PDRB PENGELUARAN - TW I 2025



Inflasi

APR'25 - MAR'25
month to month
0,77
persen

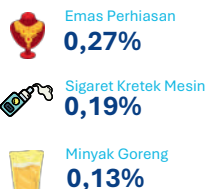
APR'25 - APR'24
year on year
1,37
persen

APR'25 - DES'24
year to date
1,71
persen



Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi utama y-on-y dengan andil 0,73% pada April 2025

Komoditas Penyumbang Inflasi (y-o-y)



Komoditas Penyumbang Inflasi (m-to-m)



Neraca Perdagangan



s.d April 2025
surplus **US \$ 573,4 Jt**
↑107,11%

Ekspor

US \$ 576,35 jt

↑106,15%
dari s.d. April-24

Impor

US \$ 2,95 jt

↑8,46%
dari s.d. April-24

Indikator Kesejahteraan

IPM
74,55
↑0,62%



Dimensi Pengetahuan
HLS
12,49 tahun



Umur Panjang dan Hidup Sehat
UHH
74,12 tahun



Hidup Layak
Pengeluaran Per Kapita
Rp13,67 juta



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Feb-24 **70,66** ➡ Feb-25 **67,67** ↓



Tingkat Pengangguran Terbuka

Feb-24 **3,85** ➡ Feb-25 **4,17** ↑



Serapan Tenaga Kerja Tertinggi

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
28,09%



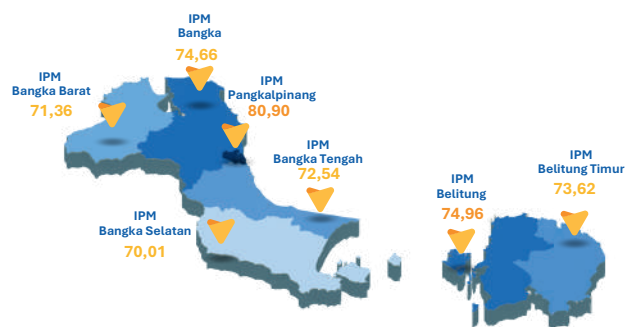
NTP Apr-25

149,01
↓4,55%
dari Mar-25



NTN Apr-25

108,22
↑1,76%
dari Mar-25

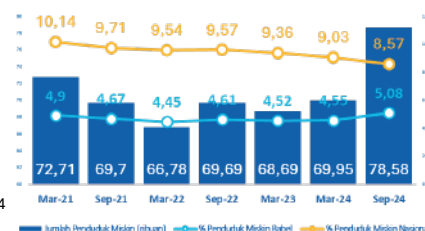


IPM Babel 2024 sebesar 74,55 termasuk kategori tinggi.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya, baik untuk Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, maupun Pengeluaran Riil per Kapita.



Tingkat kemiskinan Babel September 2024 sebesar 5,08 persen. Capaian tersebut terendah keempat secara nasional.



Highlight KINERJA APBN

s.d. 30 April 2025

Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah efisiensi Belanja Negara

I-Account APBN Kep. Bangka Belitung

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara

Rp1,19 T

▲ 35,66% yoy

- Kontribusi **Penerimaan Perpajakan** masih mendominasi sebesar **92,31 persen** dari total Pendapatan Negara.

Belanja Negara

Rp2,87 T

▼ 9,01% yoy

- Belanja negara masih didominasi TKD yaitu sebesar **76,18 persen**.

Defisit Anggaran

Rp1,68 T

Uraian	2024			2025			% Growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
a	b	c	d	e	f	g	
A. Pendapatan Negara	3.659,50	880,41	24,06%	3.296,13	1.194,39	36,24%	35,66%
I. Penerimaan Dalam Negeri	3.659,50	880,41	24,06%	3.296,13	1.194,39	36,24%	35,66%
1. Penerimaan Perpajakan	3.511,98	787,69	22,43%	3.141,17	1.102,50	35,10%	39,97%
a. Pajak Dalam Negeri	3.448,10	782,94	22,71%	3.125,45	1.009,98	32,31%	29,00%
Pajak Penghasilan Non Migas	1.591,18	324,76	20,41%	1.184,74	408,97	34,52%	25,93%
Pajak Pertambahan Nilai	1.726,64	455,73	26,39%	1.908,46	527,18	27,62%	15,68%
Pajak Bumi dan Bangunan	101,10	2,44	2,42%	32,20	0,97	3,02%	-60,26%
Cukai	-	0,01	0,00%	-	0,18	0,00%	1443,74%
Pajak Lainnya	29,18	0,00	0,01%	0,05	72,69	145143,65%	3533009,63%
b. Pajak Perdagangan Internasional	63,88	4,75	7,43%	15,71	92,51	588,75%	1848,98%
Bea Masuk	5,29	0,17	3,17%	5,48	0,54	9,90%	223,21%
Bea Keluar	58,59	4,58	7,82%	10,23	91,97	898,84%	1908,61%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,52	92,72	62,85%	154,97	91,89	59,30%	-0,90%
Pendapatan PNPB Lainnya	97,24	73,60	75,69%	105,18	69,57	66,14%	-5,48%
Pendapatan Badan Layanan Umum	50,28	19,12	38,02%	49,78	22,32	44,84%	16,75%
B. Belanja Negara	10.473,54	3.157,05	30,14%	9.795,62	2.872,73	29,33%	-9,01%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.703,00	965,24	26,07%	3.092,85	684,23	22,12%	-29,11%
Belanja Pegawai	1.303,95	435,75	33,42%	1.284,68	461,57	35,93%	5,93%
Belanja Barang	1.776,39	431,98	24,32%	1.153,28	201,96	17,51%	-53,25%
Belanja Modal	614,48	93,79	15,26%	644,98	16,24	2,52%	-82,68%
Belanja Bantuan Sosial	8,18	3,73	45,56%	9,90	4,46	45,00%	19,47%
II. Transfer ke Daerah	6.770,54	2.191,81	32,37%	6.702,77	2.188,50	32,65%	-0,15%
a. Dana Perimbangan	6.377,05	2.018,89	31,66%	6.331,66	2.003,21	31,64%	-0,78%
1) Dana Bagi Hasil	644,78	183,39	28,44%	543,62	128,38	23,62%	-30,00%
2) Dana Alokasi Umum	4.369,34	1.630,16	37,31%	4.500,91	1.605,20	35,66%	-1,53%
3) Dana Alokasi Khusus	1.362,92	205,33	15,07%	1.287,12	269,63	20,95%	31,32%
- DAK Fisik	493,77	-	0,00%	335,20	2,80	0,84%	100,00%
- DAK Nonfisik	869,15	205,33	23,62%	951,93	266,83	28,03%	29,95%
b. Insentif Fiskal	98,10	18,94	19,31%	71,95	22,15	30,78%	16,91%
c. Dana Desa	295,39	153,98	52,13%	299,17	163,14	54,53%	5,95%
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	- 6.814,03	- 2.276,64	33,41%	- 6.499,49	- 1.678,34	25,82%	-26,28%

Pendapatan Negara

- **Penerimaan Pajak** didominasi PPN (Rp527,18 M) dan PPh (Rp408,97 M) disebabkan oleh peningkatan setoran masa dari aktivitas pertambangan dan aktivitas penunjang pertambangan. PBB berkontraksi 60,26% dikarenakan banyak wajib pajak yang pusatnya di luar wilayah Kep. Babel

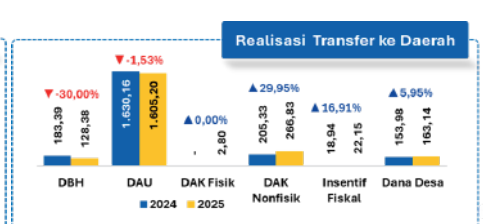
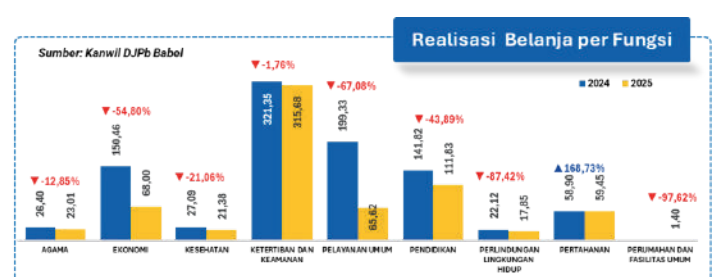
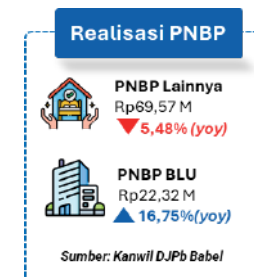
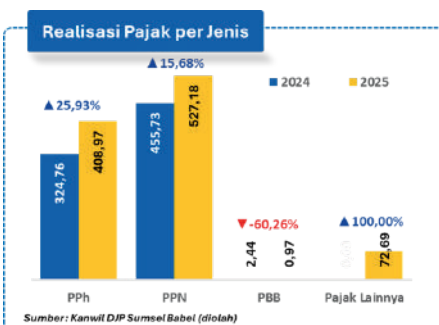
- **Bea Keluar** mendominasi dalam postur Bea Cukai sebesar 99,22%. Akselerasi ekspor Produk Turunan CPO yaitu RBD Palm Olein mendorong Bea Keluar tumbuh signifikan 1.908,61%, dan telah melampaui target dari capaian tahun 2025 sebesar 898,84%.

- Kontribusi terbesar pada realisasi **PNBP** bersumber dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang terealisasi sebesar Rp22,47 miliar dan melambat 8,12% yoy. **Pendapatan BLU** didominasi Pendapatan Jasa Layanan Umum yang tumbuh 17,66% karena kenaikan pendapatan jasa pelayanan pendidikan.

Belanja Negara

- **Belanja Barang** dan **Belanja Modal** terdampak signifikan atas kebijakan efisiensi, terutama belanja barang non operasional dan peradilan, serta penurunan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

- **DBH** melambat karena penurunan realisasi DBH SDA Pertambangan Umum (55,70% yoy). **DAU** mendominasi 73,35% dan melambat 1,53% yoy karena penurunan realisasi DAU block grant.



Highlight KINERJA APBD

s.d. 30 April 2025

I-Account APBD Konsolidasian

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Daerah Konsolidasi

Rp1,96 T

▼ 33,58% yoy

- Kontribusi **Pendapatan dari Dana Transfer** masih mendominasi sebesar **78,74 persen** dari total Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah Konsolidasi

Rp1,35 T

▼ 18,69% yoy

- Kontribusi Belanja Daerah didominasi dari **Belanja Operasi** sebesar **88,90 persen**.

Surplus Anggaran

Rp132,55 M

URAIAN	2024			2025			
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	% Growth
A. Pendapatan	8.874,52	2.948,93	33,23%	8.832,82	1.958,58	22,17%	-33,58%
I. Pendapatan Asli Daerah	2.079,89	592,36	28,48%	2.109,10	415,71	19,71%	-29,82%
- Pajak Daerah	1.513,30	381,33	25,20%	1.407,48	283,17	20,12%	-25,74%
- Retribusi Daerah	153,94	45,18	29,35%	415,74	76,17	18,32%	68,58%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57,05	52,81	92,57%	57,28	0,00	0,00%	-100,00%
- Lain-lain PAD yang Sah	355,60	113,04	31,79%	228,62	56,38	24,66%	-50,13%
II. Pendapatan dari Dana Transfer	6.748,95	2.356,24	34,91%	6.704,68	1.542,18	23,00%	-34,55%
III. Lain - lain Pendapatan Daerah	45,69	0,33	0,72%	19,05	0,69	3,62%	108,19%
B. Belanja Daerah dan Transfer	10.113,77	2.245,66	22,20%	9.641,26	1.825,94	18,94%	-18,69%
I. Belanja Operasi	8.042,62	1.937,53	24,09%	7.976,68	1.623,30	20,35%	-16,22%
- Belanja Pegawai	4.067,37	1.215,21	29,88%	4.616,63	1.163,52	25,20%	-4,25%
- Belanja Barang dan Jasa	3.523,29	624,43	17,72%	3.175,41	409,24	12,89%	-34,46%
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Belanja Subsidi	2,14	0,22	10,06%	2,43	0,59	24,20%	172,48%
- Belanja Hibah	427,82	97,22	22,72%	159,15	47,45	29,81%	-51,20%
- Belanja Bantuan Sosial	22,01	0,45	2,04%	23,07	2,51	10,89%	459,64%
II. Belanja Modal	1.220,09	26,90	2,20%	920,78	20,52	2,23%	-23,70%
III. Belanja Tidak Terduga	94,75	1,51	1,60%	71,82	1,10	1,53%	-27,38%
IV. Transfer Pemerintah Daerah	756,31	279,72	36,98%	671,98	181,02	26,94%	-35,28%
- Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0,00	2,27	0,00%	27,60	28,02	101,54%	1134,92%
- Transfer Bantuan Keuangan	756,31	277,45	36,68%	644,38	153,00	23,74%	-44,86%
C. Surplus/Defisit Anggaran	-1.239,25	703,28	-56,75%	-808,43	132,64	-16,41%	-81,14%
D. Pembiayaan Daerah	1.239,25	0,00	0,00%	808,43	-0,09	-0,01%	0,00%
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.382,95	0,00	0,00%	893,54	0,02	0,00%	0,00%
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	123,69	0,00	0,00%	85,11	0,11	0,13%	0,00%
SILPA	0,00	703,28	0,00%	0,00	132,55	0,00%	-81,15%

- Secara kumulatif per Triwulan I 2025, **Pendapatan Asli Daerah** didominasi oleh Pajak Daerah dengan kontribusi 68,12%.
- Kinerja **Retribusi Daerah** tumbuh positif dan signifikan sebesar 68,6 persen dipengaruhi oleh peningkatan kinerja seluruh komponen retribusi daerah dan reklasifikasi pendapatan BLUD kesehatan ke Retribusi Jasa Umum.
- Penurunan **Lain-lain PAD yang Sah** dipengaruhi penurunan Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Bunga, dan Penerimaan Jasa Giro.

- Belanja Pegawai** turun 4,25% yoy karena sebagai implikasi penurunan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.
- Belanja Barang dan Jasa** melambat 34,46% yoy sebagai akibat turunnya kinerja Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- Belanja Modal** turun 23,70% yoy, utamanya karena perlambatan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Kinerja Pajak Konsumtif



PBJT Jasa Perhotelan
Rp5,48 M
▼ 16,48%



PBJT Makanan/Minuman
Rp15,18 miliar
▼ 10,67%



PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
Rp1,52 M
▲ 9,65%



PBJT Jasa Parkir
Rp359,14 miliar
▼ 40,37%

Pajak Daerah Non Konsumtif



Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor
Rp63,24 M
▼ 25,59%



BBN KB
Rp22,12 M

+ Opsen BBNKB
Rp12,70 M
▼ 23,98%



PKB
Rp49,44 M

+ Opsen PKB
Rp25,92 M
▼ 9,16%



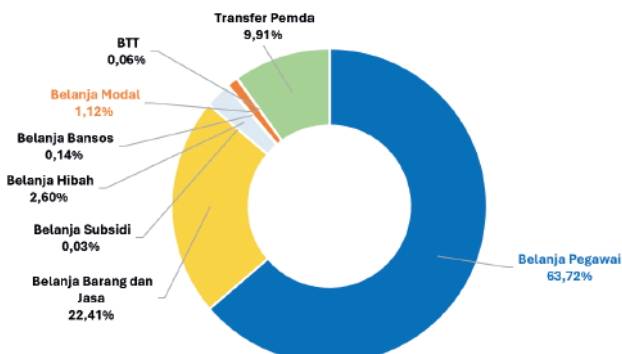
PBB-P2
Rp2,14 M
▼ 12,22%



MBLB
Rp15,97 M

+ Opsen MBLB
Rp3,13 M
▼ 7,54%

Proporsi Belanja Daerah dan Transfer



- Sampai akhir April 2025, Belanja Pegawai masih mendominasi Belanja APBD Konsolidasian dengan realisasi sebesar Rp1,16 T atau 63,72% dari total realisasi Belanja Daerah dan Transfer. Sedangkan, Belanja Modal berkontribusi sebesar 1,12% atau terealisasi sebesar Rp20,52 M.
- Pemda lingkup Kep. Bangka Belitung perlu mengupayakan penurunan proporsi Belanja Pegawai secara bertahap sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2022 yang mengamankan alokasi Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah dan Transfer, dan selanjutnya diiringi belanja infrastruktur sebesar 40%.

Kemandirian Fiskal Bangka Belitung Tercatat Rendah

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Daerah konsolidasian di Kep. Bangka Belitung s.d. April 2025 yakni 0,21 dan tercatat tumbuh dari Indeks Kemandirian Fiskal s.d. April 2024 yakni 0,20. IKF di Kep. Bangka Belitung dikelompokkan dalam kondisi "Belum Mandiri" (< 0,25). Hal ini mengindikasikan bahwa PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga pemda di Kep. Bangka Belitung masih sangat tergantung dengan dana transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai 22,77% belanja daerah.



DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN

Satker agar mengajukan penerbitan dan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah secara optimal dalam melakukan transaksi belanja Uang Persediaan. Selain itu, satker perlu mendorong pemanfaatan Digipay dalam melakukan transaksi belanja dalam rangka mendukung digitalisasi keuangan.



PENINGKATAN PAD DAN KEMANDIRIAN DAERAH

Indeks Kemandirian Daerah Kepulauan Bangka Belitung secara konsolidasian sebesar 0,22 (Belum Mandiri) yang menandakan masih tingginya ketergantungan daerah pada transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu:

- Pemda perlu memetakan sektor-sektor perpajakan yang belum optimal dan melakukan penggalan potensi perpajakan. Optimalisasi dapat diprioritaskan pada BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Rokok, PBB KB, PKB, BBNKB, dan Pajak Hotel yang masih berpotensi meningkat apabila dilakukan perbaikan administrasi.
- Dalam rangka upaya peningkatan pajak restoran yang tengah berkontraksi, Pemda perlu melakukan optimalisasi penggunaan *tapping box* dan memberlakukan sistem *reward and punishment* bagi wajib pajak.
- Optimalisasi pemanfaatan dan penertiban aset negara/daerah, mendorong kerja sama pembiayaan di sektor pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan, serta penguatan peran UMKM lokal dan peningkatan sinergi antarlembaga untuk mengembangkan strategi pemanfaatan kekayaan negara di Bangka Belitung.
- Pemda agar dapat mengakses pembiayaan kreatif (*creative financing*) dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau pembiayaan lainnya.



FOKUS PEMULIHAN EKONOMI

Dalam rangka mengurangi ketergantungan ekonomi kepada timah, dalam jangka panjang diperlukan *shifting* perekonomian di luar sektor pertambangan, misalnya pertanian, yang dapat menyerap tenaga kerja informal dan besar kontribusinya terhadap PDRB. Selain pertanian, diperlukan peningkatan daya saing sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, perkebunan dan perikanan (*green economy and blue economy*). Intervensi pemerintah juga diperlukan dengan peningkatan belanja APBN dan APBD terutama belanja infrastruktur dan padat karya, serta belanja bansos dan bantuan pemerintah lainnya untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kep. Bangka Belitung. Di sisi lain, Pemda agar bertindak sebagai *leader* untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM berorientasi ekspor



“Rekonstruksi kebijakan fiskal terus dijaga untuk mendukung penguatan ekonomi dan keberlangsungan aspek pembangunan daerah”

